

5. KESIMPULAN

Kasus penculikan telah lama menjadi permasalahan di dalam negeri Jepang. Lima Perdana Menteri (Kiichi Miyazawa [1991-1996], Hashimoto Ryutaro [1996-2001], Junichiro Koizumi [2001-2006], Shinzo Abe [2006-2007], Yasuo Fukuda [2007-...]) yang memerintah hingga saat ini belum dapat menyelesaikan kasus penculikan ini secara tuntas. Kasus penculikan merupakan permasalahan utama dalam hubungan Jepang dengan Korea Utara. Kasus ini telah menjadi permasalahan nasional dimana masyarakat, pemerintah dan media masa ikut berperan dalam menyelesaikan kasus penculikan ini. Kasus penculikan ini penting bagi masyarakat Jepang adalah karena kasus ini merupakan permasalahan kemanusiaan dimana bagi bangsa Jepang masalah kemanusiaan adalah hal yang utama.

Terungkapnya kasus penculikan membawa perubahan dalam cara diplomasi yang dilakukan Jepang terhadap Korea Utara. Pada awalnya Jepang dan Korea Utara hanya melakukan pembicaraan normalisasi hubungan melalui pembicaraan bilateral kedua negara dan hanya melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan. Namun setelah kasus penculikan ini terungkap pada tahun 1997, Jepang mulai melakukan diplomasi dengan cara yang berbeda, yaitu melalui diplomasi ekonomi, dan pembicaraan mengenai normalisasi hubungan kedua negara juga mulai diangkat dalam forum Internasional.

Meskipun Korea Utara telah mengakui penculikan yang dilakukan oleh agen rahasianya dan bahkan telah mengembalikan lima orang korban yang dinyatakan masih hidup, namun bagi Jepang kasus ini masih belum selesai, karena Jepang masih menuntut Korea Utara untuk memberikan informasi yang benar mengenai kasus penculikan ini. Karena berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang bersama dengan Asosiasi yang khusus menangani kasus penculikan ini, ditemukan bahwa korban penculikan tidak hanya 17 orang seperti yang diakui oleh Korea Utara, tetapi ditemukan terdapat sekitar kurang lebih 400 orang korban yang diperkirakan telah diculik oleh Korea Utara.

Tekanan masyarakat yang menginginkan diberikannya sanksi ekonomi terhadap Korea Utara tidak ditanggapi oleh Koizumi. Karena ada beberapa hal yang dikhawatirkan, yaitu:

(1)

epemilikan nuklir dan misil oleh Korea Utara. Karena Jepang khawatir nantinya sanksi ekonomi tersebut diikuti dengan peluncuran misil yang merupakan ancaman bagi keselamatan bangsa.

(2)

ktivitas kriminal Korea Utara, yaitu perdagangan obat-obatan terlarang. Dimana hasil perdagangan ini diperkirakan menjadi salah satu penghasilan terbesar Korea Utara.

(3)

antuan negara lainnya khususnya Cina dan Korea Selatan yang merupakan dua negara terbesar yang memberikan bantuan dan juga perdagangan kepada Korea Utara.

Meskipun pada akhirnya Jepang melakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, namun hasilnya tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Korea Utara. Karena Korea Utara masih memiliki sumber dana lain yang jumlahnya jauh lebih besar dengan yang didapatnya dari Jepang. Oleh karena itu, jika Jepang ingin sanksi ekonominya berhasil, maka Jepang harus membendung ketiga kekuatan tersebut yang telah memberikan kekuatan bagi Korea Utara.

Diantara ketiga hal ini, kepemilikan nuklir dan misil oleh Korea Utara sangat mempengaruhi tindakan Jepang dalam melakukan diplomasi. Jepang sangat khawatir, jika pihaknya melakukan sanksi ekonomi, maka Korea Utara akan balik menyerang dengan kekuatan misil yang dimilikinya.

Dalam melakukan setiap tindakan, Jepang selalu berkompromi dengan Amerika Serikat, dan tindakan yang dilakukan Jepang juga mengikuti keputusan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini memperlihatkan bahwa Jepang sangat bergantung terhadap Amerika Serikat.

Sebenarnya, sikap yang diambil oleh Korea Utara, adalah berdasarkan sikap Jepang yang tidak mau mendengarkan permintaan Korea Utara. Jepang

selalu dalam posisi yang harus selalu dituruti dan Korea Utara dalam posisi yang harus selalu menurut. Hal ini terlihat dalam penyelesaian kasus penculikan. Ketika melakukan normalisasi hubungan dengan penanda tangan Deklarasi Pyongyang, Korea Utara 'dipaksa' untuk memberikan pengakuan mengenai kasus penculikan. Apabila tidak, Jepang tidak mau menandatangani deklarasi tersebut dan hal ini dituruti oleh Korea Utara. Kemudian ketika Korea Utara mengizinkan korban penculikan kembali ke Jepang dan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu, hal ini tidak dipenuhi oleh Jepang. Hingga waktu yang telah disepakati, korban tersebut tidak dikembalikan ke Korea Utara. Kemudian pada tahun 2004, Jepang meminta kepada Korea Utara untuk mengembalikan keluarga para korban penculikan yang masih berada di Korea Utara kembali ke Jepang, Jepang menjanjikan akan memberikan bantuan pangan dan obat-obatan. Hal ini juga dipenuhi oleh Korea Utara. Saat itu Jepang memenuhi janjinya dengan mengirimkan bantuan yang telah dijanjikan, tetapi bantuan tersebut hanya setengah dari jumlah yang dijanjikan. Jepang menyatakan akan memberikan setengahnya lagi ketika Korea Utara telah memberikan seluruh informasi mengenai kasus penculikan ini.

Banyak tuntutan yang diminta oleh Jepang dipenuhi oleh Korea Utara. Tetapi tuntutan yang diminta oleh Korea Utara tidak pernah dipenuhi oleh Jepang, yaitu tuntutan kompensasi perang. Apabila Jepang mau memenuhi tuntutan ini, pasti akan lebih mudah bagi Jepang untuk mendapatkan kejelasan nasib dari para korban penculikan tersebut. Tetapi tentu saja Jepang khawatir bila memberikan kompensasi dalam bentuk keuangan. Karena Jepang khawatir kompensasi ini akan digunakan untuk membiayai militer dan program nuklir dan misil Korea Utara. Apabila hal tersebut terjadi, maka keamanan wilayah Jepang akan terganggu.